

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Rousseau, negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka.<sup>1</sup> Ada pendapat yang mengatakan bahwa suatu negara hanya dapat disebut sebagai negara hukum, manakala negara itu mengurangi hak-hak dasar warganegaranya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat menjadi HAM), karena HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Ciri tersebut berupa pengakuan dan pengukuhan yang menjadi salah satu tujuan dari negara hukum dengan melindungi HAM itu sendiri. Dalam negara hukum selalu ada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum, sosial, budaya, dan ekonomi.

Dengan adanya pengakuan dan perlindungan dari sebuah institusi berupa negara, maka diharapkan adanya jaminan terhadap HAM dalam semua bidang yang menjadi bagian dan ruang lingkup HAM tersebut. Dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu:

---

<sup>1</sup> Andi Nova, dkk., 2015, *Ilmu Negara*, Andalas University Press, Padang, Hlm.23.

<sup>2</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Hlm. 25.

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga merinci pengaturan tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal demi pasal. Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 27,28,28A-28J,29,30,31 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut G.J. Wolhorts, Pengertian Hak Asasi Manusia adalah “sejumlah hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia, dan justru karena kemanusiaannya itulah, hak tersebut tidak dapat dicabut siapa pun juga karena jika dicabut akan hilang kemanusiaannya.”<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah SWT dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Semenjak dilahirkan di dunia, setiap manusia telah memiliki hak-hak dasar tidak memandang suatu suku, agama, maupun ekonomi, baik yang bebas maupun yang terampas kemerdekaannya. Negara berkewajiban untuk melindungi dan menjamin hak pendidikan warga negara sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

---

<sup>3</sup> Tersedia pada, <https://pengertianahli.id/2014/10/pengertian-ham-dan-macam-ham>, Diakses pada 1 Februari 2020, Pukul 21.20 WIB.

Pendidikan merupakan hal terpenting dan utama dalam kehidupan. Semua warga negara di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Ini secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.<sup>4</sup> Artinya negara menjamin akan kelangsungan pendidikan bagi warga negaranya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Wajib belajar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disingkat menjadi Sisdiknas) adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Hak Asasi Manusia yang merupakan hak yang dimiliki seseorang semenjak dilahirkan, juga tidak terkecuali kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disingkat menjadi ABH) yang telah melakukan suatu tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi hak mereka tidak pernah hilang yang mana mempunyai hak-hak yang pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu pembinaan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, Hlm. 171.

Dalam Pasal 10 Konvensi Hak Sipil dan Politik menyebutkan :

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;
3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa, “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan” Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa terpidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan Narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan

---

<sup>6</sup> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)



13. Mendapatkan hal-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hak yang dimiliki oleh ABH di dalam Lembaga Perasyarakatan (selanjutnya disingkat menjadi Lapas) adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pada dasarnya konstitusi Indonesia telah menjamin dan memberikan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 :

“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi , seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 juga menjamin bagi tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidupnya dan untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Perlu ditegaskan bahwa hak pendidikan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan negara wajib membiayainya. Sama halnya dengan anak yang berhadapan dengan hukum, meskipun karena kesalahannya hak-haknya tersebut tidak semuanya dihapuskan, terutama haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para ABH harus tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari petugas Lapas guna mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembinaan serta pemenuhan hak-haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka adanya tuntutan untuk menggantikan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Maka pada tanggal 5 Agustus 2015 diresmikannya perubahan nama dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak di seluruh Indonesia, termasuk diantaranya Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati.

Pada Pasal 1 angka 20, Pasal 85 dan Pasal 105 angka 1 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan pula bahwa LPKA

merupakan tempat Anak menjalani masa pidana, wajib menyelenggarakan pendidikan, pembinaan, perawatan dan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada perubahan pola pikir dan sistem perlakuan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, khususnya Anak berkonflik dengan hukum (pelaku) selama menjalani masa pidana. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibentuklah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disingkat menjadi LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (selanjutnya disingkat menjadi LPAS) di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.HH-09.OT.01.02 tanggal 23 Desember 2014 tentang penetapan sementara Lapas dan Rutan di Indonesia sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sstem Pendidikan Nasional yakni Pasal 4 angka 1 menyatakan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa”. Sehingga pendidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA harus sama seperti anak pada umumnya. Sedangkan apabila anak menjalankan pidananya di LPKA maka proses pendidikan yang dilakukan oleh anak tersebut akan berbeda dengan anak pada umumnya yang tidak sedang menjalankan pidana di LPKA. Jika anak yang tidak dipidana mendapatkan pendidikan di sekolah umum, maka anak yang dipidana akan mendapatkan pendidikan di dalam LPKA. Hal ini dikarenakan hak kemerdekaan anak dirampas oleh negara.

Berbagai macam pemikiran dan pendapat tentang pemenuhan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan berdasarkan hal-hal tersebut maka untuk mengetahui lebih rinci dan mendalam mengenai hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka penulis tertarik untuk menulis, meneliti dan

melakukan pengkajian sebagai data yang konkrit dan kemudian penulis mewujudkan dalam tulisan yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa saja kendala- kendala yang ditemui dalam pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum dalam mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Sehingga dapat diketahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati. Serta menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian dan dapat mengolah, menganalisa secara mendalam dan konkrit tentang materi pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, institusi maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap perlindungan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum



- b. Hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja dibidang hukum.

## E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk memudahkan penulis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

### 1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu suatu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan di LPKA Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik,

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Hlm. 133.

atau faktor-faktor tertentu.<sup>8</sup> Penulis memberikan gambaran mengenai bagaimana bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Data dalam penelitian penulis dapatkan melalui

##### 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan agar memperoleh data dari sumber nya secara langsung guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan dengan cara mencari tanggapan tentang permasalahan yang akan diteliti di LPKA Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

##### 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.<sup>9</sup>

#### b. Jenis Data

1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>10</sup> Penulis mendapatkan data dengan melakukan wawancara

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.

<sup>9</sup> Widodo, 2017 *Metodologi Penelitian Populer dan Praksis* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm.75.

<sup>10</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 23.

dengan pihak-pihak yang terkait di LPKA Klas II Tanjung Pati yaitu Masri Fabrar, A.Ks. selaku Kepala Seksi Pembinaan, Herman, S.Sos. selaku Kepala Sub Seksi Registrasi, Bayu Suwandi sebagai Petugas Pemasyarakatan dan 2 (dua) orang ABH inisial R dan Z.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Penulis mendapatkan data sekunder dari buku Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara dan buku Hak Anak Bagian dari HAM.

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
7. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum yang dapat membantu, menganalisa, memahami, dan menjelaskan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku dan tulisan yang

berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dan pendidikan. Penulis menggunakan beberapa buku seperti buku Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara, buku Hak Anak Bagian dari HAM dan buku Metode Penulisan dan Penelitian Hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.<sup>11</sup> Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi KBBI) dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis juga digunakan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Kepala Seksi Pembinaan yakni Bapak Masri Fabrur, A.Ks. Herman Kepala Sub Seksi Registrasi yakni Bapak Herman, S. Sos, Petugas Pemasyarakatan Bayu Suwandi dan 2 (dua) orang ABH inisial R dan Z.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.33.



b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam peristiwa hukum seperti dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penulis melakukan pengamatan di LPKA Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data yaitu dengan cara menyeleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya.<sup>12</sup> Nantinya seluruh data yang didapatkan di LPKA Klas II Tanjung Pati dikumpulkan selanjutnya dilakukan penyaringan terhadap data tersebut agar data yang didapat lebih akurat.

Pada tahap berikutnya dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis untuk meningkatkan mutu kehandalan (*reabilitas*) yang hendak dianalisis.

b. Analisis data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menilai data yang telah disajikan untuk menjawab masalah berdasarkan teori-teori yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.

---

<sup>12</sup> Sumardi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 40.